



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADMINISTRASI HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LYDIA SILVANNA DJAMAN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADMINISTRASI HUKUM
3. NHK : 135951

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.048.375.000

1. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.256.000
2. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.256.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 813.888.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 62.025.000
5. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.920.000
6. Tanah Seluas 10092 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.686.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/84 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 775.172.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/84 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 775.172.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 799.500.000

1. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 365.500.000



2. MOBIL, HONDA HRV MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU LUXIO MINI BUS Tahun 2021, LAINNYA Rp. 209.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.440.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	800.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.160.559.322
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.248.934.322
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.248.934.322

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.